



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2019



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) *Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019* dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022 yaitu :

Visi :

**“ TERWUUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Misi :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Marabahan, Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala



dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 4 (empat) indikator dengan capaian 3 (satu) indikator sesuai target (=100 persen), dan 1 (satu) indikator belum mencapai target (< 100 persen)

**CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	
			Target	Realisasi
1.	Kasus kematian ibu	kasus	4 Kasus	0 Kasus
2.	Kasus Kematian Bayi	kasus	52 Kasus	59 Kasus
3.	Persentase Balita Stunting	persen	26 Persen	22 Persen
4.	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama)	persen	5 Persen	5 Persen

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran dan mengacu pada 1 (satu) misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

“Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2019”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart	Kasus kematian ibu	100			100			
		Kasus Kematian bayi	86					86	
		Persentase Balita Stunting	100			100			
2.	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100			100			

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis Organisasi	4
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematika Penyusunan	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.1.1 Tujuan	7
2.1.2 Sasaran	7
2.1 Perjanjian Kinerja 2019	8
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	12
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15
3.3 Akuntabilitas Keuangan	20
 BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	8
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	11
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai	12
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	13
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase Tahun 2019	14
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori Tahun 2018	14
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Barito kuala	15
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	16
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019	16
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	17
Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	18
Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	20
Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	20
Tabel 3.2.2 Komposisi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	8
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	11
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai	12
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	13
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase Tahun 2019	14
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori Tahun 2018	14
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Barito kuala	15
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	16
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019	16
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	17
Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	18
Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	20
Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	20
Tabel 3.22 Komposisi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Bupati Barito Kuala tentang Renstra 2017 -2022
- Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019
- Lampiran 4 Data Dukung IKU Tahun 2019
- Lampiran 5 Foto Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD. Sedangkan berdasarkan Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dan untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan di perlukan indikator kinerja.

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Kesehatan
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.

- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang kesehatan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah

Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

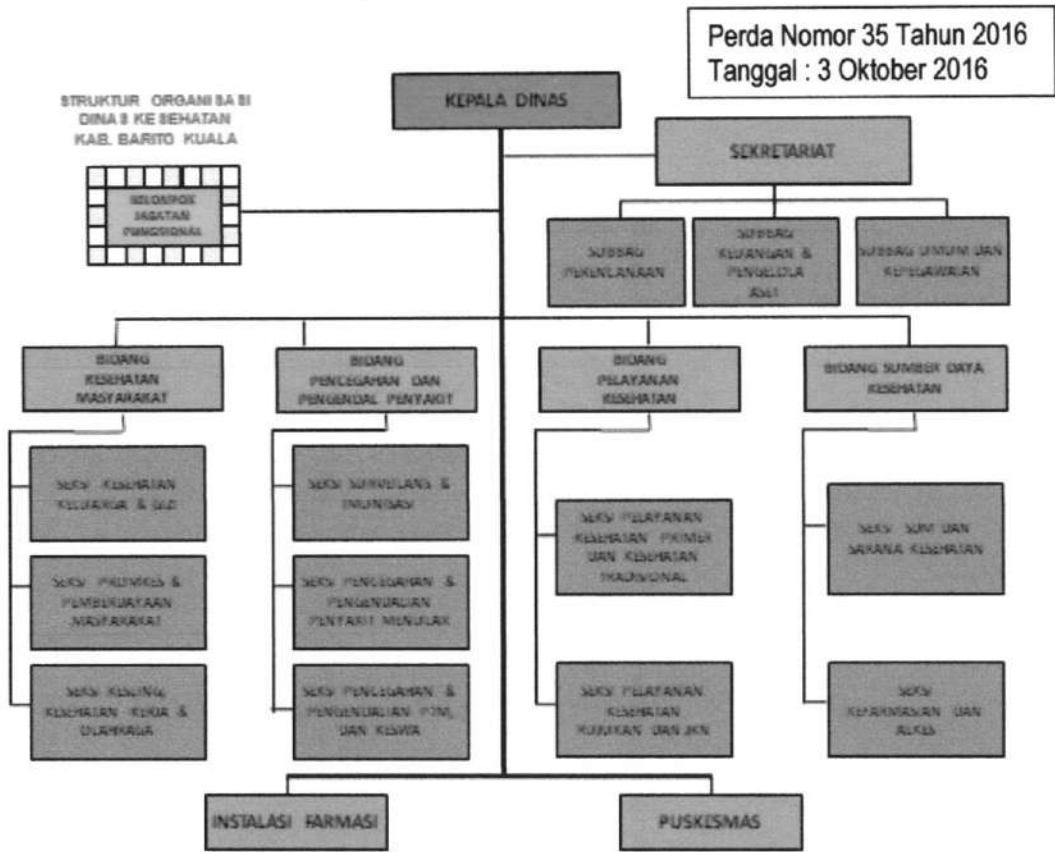
Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, unsur-unsur Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Farmasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan dan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- 6) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 24 November 2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala



1.3 Isu Strategis Organisasi

Beberapa permasalahan utama yang di hadapi oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Angka kematian Ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan antara lain meningkatkan kerja sama lintas sektor terkait dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan serta peningkatan jangkauan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- b. Upaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Kasus gizi buruk yang ditemukan dimasyarakat sudah mendapatkan perawatan sesuai standart yaitu di RS rujukan.
- c. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Barito Kuala terutama TB, Malaria, DBD dan Diare.
Bayi dan anak-anak memiliki resiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan seperti Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Typhus, Radang Selaput Otak, Radang Paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya. Salah satu pencegahan yang terbaik dan penting adalah melalui imunisasi. Berdasarkan target SPM bidang kesehatan 100 % anak harus mendapatkan imunisasi secara lengkap.
- d. Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2007 rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per 100.000 penduduk
- e. Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan dalam kerationalan obat antibiotic, persentase penggunaan obat antibiotik pada Diare Non Spesifik dan rerata item per lembar resep masih diatas ambang toleransi, sedangkan persentase penggunaan antibiotic pada ISPA Non Pneumonia dan penggunaan injeksi pada myalgia sudah rasional.
- f. Sedangkan dalam kerationalan obat antibiotic, persentase penggunaan obat antibiotik pada Diare Non Spesifik dan rerata item per lembar resep masih diatas ambang toleransi, sedangkan persentase penggunaan antibiotic pada ISPA Non Pneumonia dan penggunaan injeksi pada myalgia sudah rasional.
- g. Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 44.01% belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 43.08 % dan desa yang menyelenggarakan STBM sebanyak 17 desa (8.46%).

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2016 ini berdasarkan pada peraturan peraturan di bawah ini :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang berupa Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Penjelasan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Dokumen PK 2019 dan Penjelasan singkat / ikhtiar PK 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Meliputi Penjelasan mengenai nilai rata - rata capaian kinerja dan kategorinya serta Hambatan dan Saran Perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 234/ KUM / 2018 tanggal 4 Juni Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 - 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan yakni meningkatkan umur harapan hidup.

2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart dan meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart, dengan indikator sasaran yakni Kasus Kematian Ibu dengan target di akhir RPJMD tahun 2022 yaitu tidak ada kasus kematian ibu (0); Kasus Kematian Bayi dengan target akhir RPJMD tahun 2022 yaitu tidak ada kasus kematian bayi (0); Persentase Penurunan Balita Stunting sampai dengan target RPJMD tahun 2022 adalah 20 %, Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama) dengan indikator akhir tahun RPJMD tahun 2022 sebesar 20 % dari jumlah puskesmas yang ada.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017- 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Umur Harapan Hidup	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Kasus Kematian Ibu
				Kasus Kematian Bayi
				Persentase Balita Stunting
			Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama)

2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Kasus Kematian Ibu	Kasus	4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	66.244.606.670
	Jumlah					66.244.606.670
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Kasus Kematian Bayi	Kasus	52	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin	183.847.900
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	184.934.900
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	94.095.500
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	270.074.400
					Program Keluarga Berencana	96.511.800
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja	96.010.100
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	115.045.500

	Jumlah					1.040.520.100
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Persentase Balita Stunting	Persen	26	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.477.207.340
					Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	30.882.334
					Program Perbaikan Gizi	375.495.700
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	603.619.100
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	97.362.234
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	166.553.500
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	421.955.900
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	812.042.714
	Jumlah					9.985.118.822
4	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi Utama)	Persen	5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya	1.200.851.713
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.701.709.008
					Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	431.113.686
					Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	281.184.520
	Jumlah					3.614.858.927
	Jumlah Total					80.885.104.519

Berdasarkan tabel 2.2 maka, pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Utama yaitu Kasus Kematian Ibu, Kasus Kematian Bayi, Persentase Balita Stunting dan Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama).

Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang kegiatannya direalisasikan melalui 16 (enam belas) program yang mendukung.

Sasaran Strategis Kedua meliputi 1 (satu) indikator kinerja dan terdiri atas 4 (empat) program kegiatan yang mendukung.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja untuk persentase < 100 mendapatkan predikat Tidak tercapai, untuk persentase = 100 mendapatkan predikat Tercapai / Sesuai target, sedangkan untuk persentase > 100 maka predikat nilai capaian kinerjanya yaitu melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja
yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	> 90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

Berdasarkan Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai, dikategorikan sebanyak 5 penilaian, yakni sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Nomor 800/0067/Dinkes/2019 Tanggal 01 Bulan Pebruari Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017- 2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Kasus Kematian Ibu	Kasus	4	0	100 %
		Kasus Kematian Bayi	Kasus	52	59	86 %
		Persentasi Balita Stunting	Persen	26	22	100 %
3	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama)	Persen	5	5	100 %

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Capaian indikator kinerja utama untuk kasus kematian ibu pada tahun 2019 mempunyai 0 kasus. Dalam hal ini lebih kecil dari yang ditargetkan setahun yakni 4 kasus, yang berarti program yang bertujuan untuk menurunkan kematian ibu hamil, bersalin dan nifas melalui persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang sesuai standar.

Pemeriksaan ibu hamil di awal trimester dan minimal 4 kali pemeriksaan oleh tenaga kesehatan kompeten, serta seluruh kegiatan baik oleh skpd itu sendiri maupun lintas sektor dapat menekan kasus kematian menjadi 0 kasus sehingga capaian menjadi 100%.

Sedangkan pada capaian indikator kinerja utama untuk kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 59 kasus, hal ini lebih besar dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2019 yakni sebanyak 52 kasus, hal ini disebabkan masih kurangnya pemantauan kehamilan dan persalinan, masih adanya persalinan di tolong dukun kampung dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan yang di tolong di fasilitas kesehatan sesuai standar, sehingga persentase capaian kenaikan dari target itu sebanyak 86 %,

Pada indikator kinerja utama persentasi balita stunting dengan target sebanyak 26 % dan realisasi sebanyak 22 %, hal ini tidak lepas dari peran lintas program dan lintas sektor untuk mendorong kebijakan akses pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat surveilans gizi masyarakatn dapat mendeteksi secara dini permasalahan gizi di masyarakat maka capaian IKU pada tahun 2019 100 %.

Pada indikator kerja utama persentasi puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama) pada tahun 2019 dengan target sebanyak 5 % realisasi sebanyak 5 % (5% dari 19 puskesmas) sehingga capaian iku senilai 100 % hal ini dikarenakan volume target sebanyak 6 puskesmas untuk peningkatan status akreditasi 1 (satu) puskesmas yang telah tercapai yaitu Puskesmas Marabahan dengan status akreditasi yakni Paripurna.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	4
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Berdasarkan Tabel 3.1.2 dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala memiliki 4 indikator kinerja utama yang mana ada 4 indikator tersebut yaitu kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, persentase balita stunting dan persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama) yang masing-masing mencapai nilai 100 %.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan Tabel 3.1.3 dari 4 Indikator Kinerja Utama yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, 3 (tiga) indikator memiliki kategori sangat baik yaitu kasus kematian ibu, persentase balita stunting dan persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama).

Ada 1 (satu) indikator memiliki kategori baik yaitu pada iku kasus kematian bayi.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017- 2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Nomor 800/0097/Dinkes/2018 Tanggal 01 Bulan Pebruari Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	3 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	3	95.33	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	1	100	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.2.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dapat dijabarkan yaitu :

Pada Sasaran strategis 1 yakni Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang memiliki 3 indikator kinerja utama rata-rata capaian sasaran yaitu untuk 3 (tiga) indikator utama yang ada yaitu kasus kematian ibu dan persentase balita stunting rata-rata capaian sasaran sebesar 100 % sehingga dikategorikan tercapai, dan ada 1 (satu) indikator utama yaitu kasus kematian bayi sebesar 86 % sehingga dikategorikan tercapai.

Pada Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart yang memiliki 1 indikator utama yaitu persentase peningkatan status akreditasi puskesmas (utama) telah mencapai nilai **predikat tercapai** dengan rata-rata capaian sasaran sebanyak 100 %.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 -89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	2	100					√
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	1	86				√	
3.	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	1	100					√

Berdasarkan Tabel 3.2.3 **Sasaran 1** Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dengan nilai capaian rata-rata sebesar 100 berada pada kisaran nilai > 90 dengan nilai sangat baik, terdiri dari 2 (dua) indikator utama yaitu kasus kematian ibu dan presentase balita stunting. Sedangkan pada sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ada 1 (satu) indikator yaitu kasus kematian bayi yang memiliki kategori baik dengan capaian sebesar 86 %.

Untuk Indikator Kinerja Utama kasus kematian bayi, realisasi dari itu ini pada tahun 2019 sebesar 59 kasus yang mana nilai ini lebih besar dari nilai yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 52 kasus.

Pada Sasaran 2 yang mempunyai 1 (satu) indikator utama yaitu persentase puskesmas peningkatan status akreditasi (utama) dengan kategori sangat baik dimana rata-rata capaian sasaran sebesar 100 % dan dari 6 puskesmas yang telah dilaksanakan reakreditasi, ada 1 puskesmas yang mendapatkan hasil di atas target, yaitu Puskesmas Marabahan dengan predikat akreditasi "Paripurna"

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	2	100			2	100 %		
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	1	0.86					1	100 %
3.	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	1	100			1	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.2.3 Sasaran strategis 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebanyak 2 indikator kinerja utama dengan nilai capaian rata-rata sebesar 100 % berada pada kisaran nilai = 100 dengan kategori sesuai target.

Ada 1 indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata sebesar 86 % berada pada kisaran nilai dibawah target < 100 %). Pada sasaran strategis 2 yang memiliki nilai capaian rata- rata sebesar 100 % berada pada kategori sesuai target.

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart

Untuk melihat capaian sasaran strategis 1 yakni “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart, maka ada 3 indikator kinerja yang digunakan, yaitu kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, persentase penurunan balita stunting dimana Capaian masing-masing sasaran dengan 3 indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018 Capaian	Tahun 2019 Capaian	Selisih Capaian	Ket.
1.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	4	0	4	Kasus Kematian ibu
2	Kasus Kematian Bayi	Kasus	52	59	7	Kasus Kematian bayi
3	Persentasi Balita Stunting	Persen	26	26	0	Persentase Balita Stunting
4	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (Utama)	Persen	5	5	0	Persentase Balita Stunting

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : Indikator sasaran 1 yakni kasus kematian bayi mengalami penurunan pada capaian tahun 2019 dibanding dari capaian tahun 2018 dengan angka kasus kematian ibu sebanyak 0 kasus di tahun 2019 lebih kecil dari yang ditargetkan di tahun 2019 sebanyak 4 kasus. Program yang bertujuan untuk mempercepat menurunnya kasus kematian ibu hamil, bersalin dan nifas melalui persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang sesuai standar.

Pemeriksaan ibu hamil di awal trimester dan minimal 4 kali pemeriksaan oleh tenaga kesehatan kompeten, serta seluruh kegiatan baik oleh skpd itu sendiri maupun

lintas sektor dapat menekan kasus kematian menjadi 0 kasus sehingga capaian menjadi 100%.

Pada kasus kematian bayi mengalami kenaikan dari tahun 2018 dimana capaian tahun 2018 sebanyak 52 kasus sedangkan capaian pada tahun 2019 menjadi 59 kasus dengan target sebesar 52 kasus di tahun 2019. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemantauan kehamilan dan persalinan, masih adanya persalinan di tolong dukun kampung dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan yang di tolong di fasilitas kesehatan sesuai standar.

Indikator persentase balita stunting pada tahun 2019 sebesar 26 % dengan target capaian sebesar 22 % di tahun 2019 ini, hal ini tidak lepas dari peran lintas program dan lintas sektor untuk mendorong kebijakan akses pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi.

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat surveilans gizi masyarakatn dapat mendeteksi secara dini permasalahan gizi di masyarakat maka capaian IKU pada tahun 2019 100 %.

Capaian indikator Sasaran 1 untuk tahun 2019 dengan indikator utama kasus kematian ibu dan persentase penurunan balita stunting didukung oleh program - program yang bersinergi dengan segala pihak dan dengan di dukung oleh kegiatan-kegiatan yang terstruktur dengan baik, dan didukung penuh dari sumber dana DAU maupun DAK BOK Non Fisik dan Jampersal yang bersumber dana pusat, namun pada indikator kasus kematian bayi mengalami kenaikan dari target.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart

Sedangkan indikator sasaran 2 yang memiliki 1 (satu) indikator utama yakni persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama) sebanyak 5 % di tahun 2018, di tahun 2019 tetap 5 %.

Keberhasilan capaian Indikator Tahun 2019 Sasaran 2 disebabkan oleh adanya program dan kegiatan yang jelas sesuai juknis dan ketentuan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut, dan juga didukung penuh dari segi pendanaan yang bersumber dari dana pusat DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Keterangan
1.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0	3	100 %	
2.	Kasus Kematian Bayi	Kasus	59	50	100 %	
3.	Persentase Balita Stunting	Persentase	22	20	20 %	Total pencapaian dari tahun 1 s.d 5 renstra 100
4.	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi	Persentase	5	20	100 %	Total pencapaian dari tahun 1 s.d 5 renstra 100 dan pada tahun pertama renstra telah terakreditasi sebanyak 6 puskesmas

Berdasarkan Tabel 3.2.6 maka untuk indikator 1 persen capaian di tahun ketiga renstra 0 kasus kematian ibu, 59 kasus kematian bayi dan 22 % untuk penurunan balita stunting sedangkan 5 % untuk persentase peningkatan status akreditasi puskesmas (utama)

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0			
2.	Kasus Kematian Bayi	Kasus	59			
3.	Persentase Balita Stunting	Persen	26			
4.	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi	Persen	5			

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 135.058.190.004,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.111.631.513.193,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 82.65 %.

Komposisi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	84.706.530.624,-	74.096.857.017,-	87.47
2	Belanja Tidak Langsung	50.351.659.380,-	37.534.656.176,-	74,56
Jumlah		135.058.190.004,-	111.631.513.193,-	82.65

Sumber: RFK APBD 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 87.47 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 74.56 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 135.058.190.004,- dengan realisasi sebesar 111.631.513.193,- atau 82.65 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart	77.270.245.592	67.468.178.734	93.21
2	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	3.614.858.927	3.351.087.940	87.26
Jumlah				

Sumber RFK Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Kesehatan pada tahun 2019.

Selain itu, terdapat pula program dan kegiatan Dana Alokasi Bidang Kesehatan (DAK) pada Tahun Anggaran 2019. Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan pada tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan dengan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Tahun 2019.

No	BIDANG	ALOKASI DAK (Rp)	PENDAMPING (Rp)	JUMLAH (REALISASI) (Rp)	REALISASI	
					Fisik (%)	Keu (%)
1	DAK FISIK	9.807.688.040,-	-	9.465.639.422,-	100	96.85
	DINAS KESEHATAN					
	A. DAK Reguler Pelayanan Dasar	6.245.082.000,-	-	5.962.903.444,-	100	94.88
	B. DAK Reguler Pelayanan Farmasi	3.235.077.000,-	-	3.175.299.800,-	100	92.58
	C. DAK Penugasan Penurunan Stunting- Pengadaan Obat Gizi	257.329.040,-	-	257.250.050,-	100	99.97
	D. DAK Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan CO Analyzer	70.200.000,-	-	70.186.128,-	100	99.98
2	DAK NON FISIK	20.043.812.000,-	-	19.207.307.459,-	100	96.58
	DINAS KESEHATAN					
	A. BOK PUSKESMAS	14.284.000.000,-	-	13.563.863.198,-	100	94.96
	B. BOK KABUPATEN	1.124.000.000,-	-	1.103.509.995,-	100	98.18
	C. BOK DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK	249.812.000,-	-	228.996.500,-	100	91.29
	D. BOK DUKMAN	953.000.000,-	-	923.873.600,-	100	96.94
	D. JAMPERSAL	2.433.000.000,-	-	2.387.579.600,-	100	98.13
	E. AKREDITASI PUSKESMAS	1.000.000.000,-	-	999.484.566,-	100	99.95
	TOTAL	29.851.500.040,-		28.663.946.881,-	100	96.85

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	3	95.33	67.468.178.734	93.21
3	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	1	100	3.351.087.940	87.26
	Jumlah	4	83.47	70.819.266.674	90.23

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif/kurang efektif/tidak efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari sasaran menunjukkan pencapaian 83.47 % yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran.

Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Terjadinya efisiensi itu adanya :

- Adanya edaran Sekretaris Daerah tentang mekanisme perjalanan dinas
- Adanya sumbangsih peran desa dalam memenuhi fasilitas posyandu
- Pengembangan sistem keuangan yang didukung simda keuangan dalam melakukan entry capaian kinerja keuangan

Pencapaian ini tetap dapat mewujudkan capaian kinerja.

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	3	95.33	93.21	2.12
2	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	1	100	87.26	12.74
	Jumlah	4	96.66	90.23	6.43

Dari Tabel 3.26 mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Kesehatan yang memiliki 4 (empat) Indikator Utama telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 1** yang memiliki 3 (tiga) indikator utama yaitu kasus kematian ibu, kasus kematian bayi dan persentase balita stunting telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 2.12 dikarenakan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran lebih besar dari pada persentase realisasi anggaran yang dimiliki.

Hal tersebut terjadi pula pada Sasaran 2 yang memiliki 1 (satu) indikator utama yaitu persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi (utama) telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 12.74 dikarenakan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran lebih besar dari pada persentase realisasi anggaran yang dimiliki.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan seluruh rangkaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama.

A. Kesimpulan.

1. Penjelasan mengenai nilai rata - rata capaian kinerja dan kategorinya.

Dinas Kesehatan memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 indikator kinerja utama dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja utama pertama yaitu Kasus Kematian Ibu dengan target sebanyak 4 kasus di tahun 2019 , realisasi sebanyak 0 kasus, nilai capaiannya sebesar 100 %. Dari data di atas jumlah kasus lebih kecil dari target, dan **dikategorikan capaian IKU tercapai**. Efektifitas pelayanan kesehatan dalam hal kesehatan ibu hamil kita dapat menekan angka kematian ibu lebih kecil dari tahun 2018 dan dari besarnya angka target tahun 2019.
- b. Indikator kinerja utama kedua yaitu Kasus Kematian bayi dengan target sebanyak 52 kasus di tahun 2019, didapatkan realisasi sebanyak 59 kasus, nilai capaiannya sebesar 86 %. Dari data tersebut jumlah kasus lebih besar dari target, masih dikategorikan capaian IKU tercapai. Namun masih ada beberapa hal yang menghambat sehingga reliasasi di tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018, diantaranya masih kurang nya pemantauan kehamilan dan persalinan, masih adanya persalinan di tolong dukun kampung dan masih kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan yang di tolong di fasilitas kesehatan sesuai standar

- c. Indikator kinerja utama ketiga yaitu Persentasi balita Stunting dimana target awal sebanyak 26 % dan realisasi 22 % dengan rata-rata capaian sebesar 100 %, adapun target akhir renstra di tahun 2022 adalah sebesar 20 %, sehingga capaian di tahun 2019 sebanyak 22 % masih lebih kecil dari target akhir. Hal ini tidak lepas dari peran lintas program dan lintas sektor untuk mendorong kebijakan akses pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat surveilans gizi masyarakatn dapat mendeteksi secara dini permasalahan gizi di masyarakat maka capaian IKU pada tahun 2019 100 %.
- d. Indikator kinerja utama keempat yaitu Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama) pada tahun 2019 mempunyai target sebesar 5 % dengan realisasi sebesar 5 % dan rata-rata capaian sebesar 100 %, volume target sebanyak 6 puskesmas dan pada tahun 2019 ini ke 6 puskesmas tersebut telah menjalani proses akreditasi dan 1 (satu) puskesmas mendapatkan nilai akreditasi paripurna yaitu Puskesmas Marabahan
- e. Realisasi Anggaran tahun 2018 sebesar 82,65 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 135.058.190.004,- untuk mendukung pencapaian IKU Dinas Kesehatan tahun 2019.
- f. Tingkat Efisiensi sebesar 6.43 % dikarenakan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran lebih besar dari pada persentase realisasi anggaran yang dimiliki.

2. Hambatan dan Saran Perbaikan

- a. Dilaksanakannya proses pembuatan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dan dengan analisa per komponen yang ditentukan, dapat terlihat pencapaian dari seluruh komponen yang dilaksanakan dengan dilengkapi oleh dokumen-dokumen terkait.
- b. Masih adanya 1 (satu) IKU dari 4 (empat) IKU yaitu kasus kematian bayi pada tahun 2019 meningkat sebanyak 86 % dengan jumlah 59 kasus dari tahun 2018 sebanyak 52 kasus yang mana di dalam pelaksanaan kegiatan menyakut IKU tersebut mengalami berbagai hambatan diantaranya :

- Sistem rujukan berjenjang yang masih belum maksimal
- Tidak adanya jaminan kesehatan yang membantu proses rujukan pasien persalinan
- Tingkat ekonomi keluarga ibu hamil
- Komplikasi penyakit yang diderita oleh ibu hamil
- Masih maka diperlukan analisa lebih lanjut oleh seluruh komponen terkait, guna pemecahan masalahnya,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

**SK RENSTRA
TAHUN 2017 S.D 2022**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman No. 62 Telp/Fax (0511) 4799052
Marabahan 70511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 800/ 1006/Dinkes

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN ,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022;
- c. bahwa, rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah disusun sebagai dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4708);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.
- Kedua : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Kuala kurun 5 (lima) tahun ke depan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

Pada Tanggal 15 April 2018



**SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS KESEHATAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/ /Dinkes/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA ESELON 3
DAN ESELON 4 PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

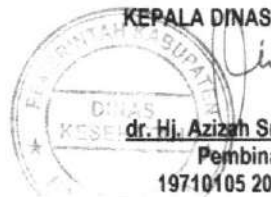
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016. tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022;
5. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/234/KUM/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Eselon 3 dan Indikator Kinerja Eselon 4 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Merevisi Indikator Kinerja Eselon 3 dan eselon 4 sebagaimana pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (Eselon 2)
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 1 Februari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH

Pembina / IV.a

19710105 200212 2 004

**SK TIM SAKIP
TAHUN 2019**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN
Jalan Jendral Sudirman No. 62 Telp/Fax (0511) 4799052
Marabahan 70511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 800/0050/Diskes/2019

TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITOKUALA

KEPALA DINAS KESEHATAN ,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyusun Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, kiranya perlu dengan segera menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas sebagai Pokja Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa PNS yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang akap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pokja Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)'

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47@);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 -;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 -2031;

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pokja Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala

KEDUA

: Yang dimaksud dengan Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan adalah :

1. Dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022
2. Dokumen Renja Tahun 2019
3. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2019
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Pohon Kinerja Tahun 2019
6. Dokumen lain terkait SAKIP 2019

KETIGA

: Tugas Pokja Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Penyiapan Data dan Informasi
 - Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen SAKIP dan disajikan dalam bentuk materi untuk memudahkan administrasi,
 - Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat di bertanggung jawabkan,
 - Menyiapkan tabel-tabel / matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuh analisis.

2. Pengolahan Data Dan Informasi

Mengolah data menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak - pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen SAKIP

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala,

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004



Lampiran 1.
Nomor

: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
: 800/ /Diskes

**SUSUNAN POKJA PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

KETUA TIM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

KOORDINATOR

1. Bid. Kesehatan Masyarakat : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Bid. P2P : Kepala Bidang P2P
3. Bid. Pelayanan Kesehatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bid. SDK : Kepala Bidang SDK

KETUA POKJA : Nana Farlina, SKM
WAKIL POKJA : Laila Wardani, SKM
Anggota : Noviani, SKM
Helda Erlena, SST, MM
Roni, S.Kep
Samsiah, SKM
M. Rinody Putera, SKM
Novi Indah Rahmika, SKM
Rise Iraduna

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala,

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

DATA DUKUNG
KEGIATAN TERKAIT IKU
TAHUN 2019



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

**REKAPITULASI
KASUS KEMATIAN IBU
TAHUN 2019**

No	Puskesmas	JUMLAH
1.	TABUNGANEN	0
2.	TAMBAN	0
3.	MEKARSARI	0
4.	JELAPAT	0
5.	ANJIR PASAR	0
6.	ANJIR MUARA	0
7.	BERANGAS	0
8.	SEMANGAT DALAM	0
9.	MANDASTANA	0
10.	JEJANGKIT	0
11.	BELAWANG	0
12.	WANARAYA	0
13.	BARAMBAI	0
14.	RANTAU BADAUH	0
15.	BANTUIL	0
16.	LEPASAN	0
17.	MARABAHAN	0
18.	TABUKAN	0
19.	KURIPAN	0
JUMLAH		0

Marabahan, 31 Desember 2019


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala,
dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

LAPORAN KEMATIAN BAYI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

Januari s/d		Januari																												
No	Puskesmas	Σ Lahir mati			Σ Lahir hidup						Bayi (0-11 bln)																			TOTAL KEMATIAN BAYI
					BB < 2.500 gr			BB ≥ 2.500 gr			Kematian Neonatal			Sebab Kematian Neonatal								Σ Kematian post neonatal (29 hr - 11 bln)	Sebab Kematian post neonatal							
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	Σ Kematian 0-6 hari	Σ Kematian 7-28 hari	Σ Kematian Neonatal	BBLR	Asfiksia	TN	Sepsis	Kelainan Bawaan	Lain-lain	Pneumonia	Diare		Kelainan Saluran Cerna	TN	Kelainan Saraf	Malaria	Lain - lain			
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	Tabunganen	7	1	8	27	16	43	143	142	285	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	8	
2	Tamban	1	2	3	10	14	24	140	101	241	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4		
3	Mekarsari	1	-	1	3	1	4	47	62	109	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
4	Jelapat	2	-	2	20	13	33	178	127	305	7	2	9	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9		
5	Anjlr Pasar	1	-	1	9	10	19	128	125	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1		
6	Anjlr Muara	2	-	2	17	16	33	154	249	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1		
7	Berangas	1	1	2	25	25	50	209	191	400	3	1	4	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4		
8	Semangat Dalam	2	1	3	2	9	11	311	241	552	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
9	Mandastana	-	1	1	10	8	18	103	101	204	3	-	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3		
10	Jejangkit	1	-	1	2	3	5	45	58	103	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		
11	Belawang	-	3	3	14	8	22	107	97	204	3	1	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4		
12	Wanaraya	3	-	3	6	7	13	93	93	186	4	-	4	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	5		
13	Barambai	-	-	-	3	-	3	132	123	255	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
14	Rantau Badauh	2	-	2	9	6	15	129	114	243	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
15	Bantuil	1	1	2	2	3	5	61	78	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	2	3		
16	Lepasan	-	2	2	12	12	24	92	81	173	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
17	Marabahan	-	-	-	8	5	13	186	172	358	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
18	Tabukan	2	-	2	7	9	16	71	54	125	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
19	Kuripan	1	-	1	2	3	5	50	34	84	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Jumlah	27	12	39	188	168	356	2,379	2,243	4,622	42	6	48	18	17	-	-	-	4	9	11	1	2	-	-	-	8	59		

4,978

Marabahan, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

dr. Hl. Azizah Sri Widari, MPH
NIP: 19710105 200212 2 004



REKAPITULASI
STUNTING PADA BALITA
TAHUN 2019

No	Puskesmas	TB/U			Total Balita	Stunting	%Stunting
		Sangat Pendek	Pendek	Normal			
1.	TABUNGANEN	143	365	1107	1615	508	31.5
2.	TAMBAN	24	108	1315	1447	132	9.1
3.	MEKARSARI	42	98	404	544	140	25.7
4.	JELAPAT	84	192	526	802	276	34.4
5.	ANJIR PASAR	1	3	132	136	4	2.9
6.	ANJIR MUARA	23	72	1011	1106	95	8.6
7.	BERANGAS	158	327	1246	1731	485	28.0
8.	SEMANGAT DALAM	164	182	1004	1350	346	25.6
9.	MANDASTANA	118	94	424	636	212	33.3
10.	JEJANGKIT	52	88	325	465	140	30.1
11.	BELAWANG	5	102	1243	1350	107	7.9
12.	WANARAYA	12	58	960	1030	70	6.8
13.	BARAMBAI	53	239	825	1117	292	26.1
14.	RANTAU BADAUH	37	129	630	796	166	20.9
15.	BANTUIL	4	1	27	32	5	15.6
16.	LEPASAN	65	255	508	828	320	38.6
17.	MARABAHAN	28	148	1351	1527	176	11.5
18.	TABUKAN	63	178	299	540	241	44.6
19.	KURIPAN	38	93	299	430	131	30.5
JUMLAH		1114	2732	13636	17482	3846	22.0

Marabahan, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala,

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

HASIL PENILAIAN

RE-AKREDITASI PUSKESMAS SEBANYAK 6 PUSKESMAS YAITU :

- 1. PUSKESMAS BERANGAS (MADYA)**
- 2. PUSKESMAS MEKARSARI (MADYA)**
- 3. PUSKESMAS MARABAHAN (PARIPURNA)**
- 4. PUSKESMAS MANDASTANA (MADYA)**
- 5. PUSKESMAS ANJIR PASAR (MADYA)**
- 6. PUSKESMAS ANJIR MUARA (MADYA)**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688099, Email : sekretariatkafkt@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14/02725/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 19 Desember 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas BERANGAS Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 04 Desember 2019 s/d 07 Desember 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : BERANGAS
Alamat : Ds. Berangas Timur, Kec. Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS MADYA**
Berlaku sampai dengan : 03 Desember 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas BERANGAS



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688099, Email : sekretariatkafktp@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14//2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 01 November 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas MEKARSARI Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 16 Oktober 2019 s/d 20 Oktober 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : MEKARSARI
Alamat : Ds. Mekarsari Km. 15.5 , Kec. Mekarsari, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS MADYA**
Berlaku sampai dengan : 15 Oktober 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif**

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas MEKARSARI



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688099, Email : sekretariatkafkt@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14/01509/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 13 November 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas MARABAHAN Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 30 Oktober 2019 s/d 03 November 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : MARABAHAN
Alamat : Jl. A. Yani No.71 Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS PARIPURNA**
Berlaku sampai dengan : 29 Oktober 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas MARABAHAN



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688089, Email : sekretariatkafktg@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14/01677/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 23 November 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas MANDASTANA Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 06 November 2019 s/d 10 November 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : MANDASTANA
Alamat : Ds. Sungai Puntik, Kec. Mandastana, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS MADYA**
Berlaku sampai dengan : 05 November 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas MANDASTANA



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688099, Email : sekretariatkafktpe@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14/01421/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 13 November 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas ANJIR PASAR Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 30 Oktober 2019 s/d 03 November 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : ANJIR PASAR
Alamat : Ds. Anjir Pasar Kota I, Kec. Anjir Pasar, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS MADYA**
Berlaku sampai dengan : 29 Oktober 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas ANJIR PASAR



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Jl. Percetakan Negara No.29, Gedung D Lantai 3 ruang D3.06, Joharbaru, Jakarta Pusat 10560
Telepon : 08111688099, Email : sekretariatkafktp@gmail.com
website : www.siaf.kemkes.go.id



No : YM.02.01/VI.14/02290/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi

Jakarta, 08 Desember 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas ANJIR MUARA Kab/Kota Barito Kuala pada tanggal 20 November 2019 s/d 24 November 2019, dengan ini kami beritahukan status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan : ANJIR MUARA
Alamat : Ds. Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Status : **STATUS MADYA**
Berlaku sampai dengan : 19 November 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI AKREDITASI FKTP
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Tembusan

1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan/Kota Barito Kuala
3. Kepala Puskesmas ANJIR MUARA

FOTO- FOTO
KEGIATAN TERKAIT IKU
TAHUN 2019



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

FOTO KEGIATAN TERKAIT

IKU KESATU : KASUS KEMATIAN IBU











FOTO KEGIATAN TERKAIT

IKU KEDUA : KASUS KEMATIAN BAYI















FOTO KEGIATAN

IKU KETIGA : PERSENTASE BALITA STUNTING











FOTO KEGIATAN

IKU KEEMPAT : PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN PENINGKATAN STATUS AKREDITASI (UTAMA)

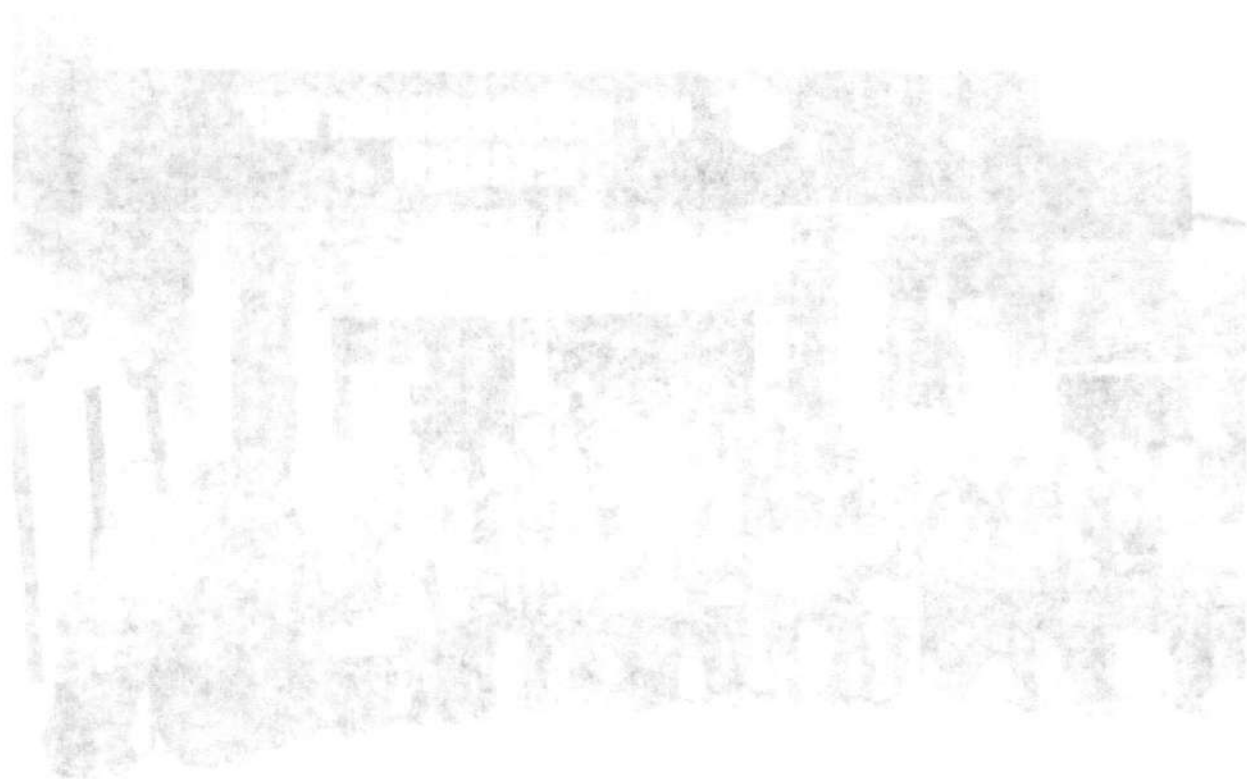
PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI PUSKESMAS



PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI PUSKESMAS



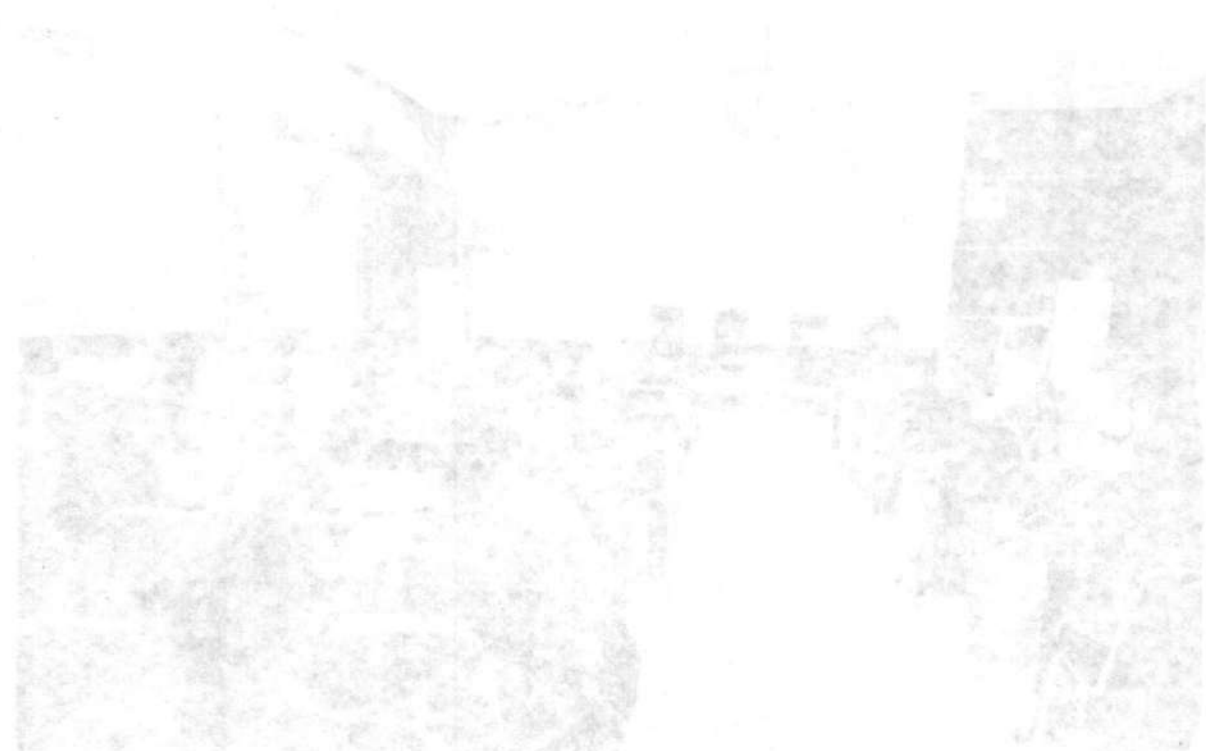




WORKSHOP PENDUKUNG IMPLEMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS



WORKSHOP PENDAHULUAN IMPLEMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Azizah Sri Widari, MPH
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Noormiliyani AS
Jabatan : Bupati Barito Kuala
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Bupati Barito Kuala

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan

Hj. NOORMILIYANI AS

dr. AZIZAH SRI WIDARI, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2109

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart	Kasus Kematian Ibu	6 Kasus	1	2	2	1
		Kasus Kematian Bayi	100 Kasus	25	25	25	25
		Persentase Balita Stunting	20 Persen	5	5	5	5
2	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama)	5 Persen	1	1	1	2

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	55,703,965.00	DAU, DAK, CHT
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,686,866,000.00	DAU DAN DAK
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	1,093,247,713.00	DAU
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,409,466,940.00	DAU DAN DAK
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	183,847,900.00	DAU
6	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	30,882,334.00	DAU
7	Program Pelayanan Kesehatan Lansia	115,045,500.00	DAU
8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	184,934,900.00	DAU
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	94,095,500.00	DAU
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	252,074,500.00	DAU
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	295,495,700.00	DAU DAN CHT
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	605,413,221.00	DAU DAN CHT

13	Program Pengawasan Obat dan Makanan	97,362,234.00	DAU
14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	797,042,714.00	DAU DAN CHT
15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	166,553,500.00	CHT
16	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	421,955,900.00	DAU DAN CHT
TOTAL		13,489,988,521.00	

Pihak Kedua

Hj Noormiliyani AS

Marabahan, 1 Februari 2019
Pihak Pertama

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIWULAN							
			SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI				SESUDAH REVISI			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart	Kasus Kematian Ibu	4 Kasus	4 Kasus	1	1	1	1	1	1	1	1
		Kasus Kematian Bayi	52 Kasus	52 Kasus	13	13	13	13	18	15	10	9
		Persentase Balita Stunting	20 Persen	26 Persen	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	26
2	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Status Akreditasi (Utama)	5 Persen	5 Persen	1	1	1	2	0	0	0	5


 Marabahan, 03 Februari 2020
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Barito Kuala
DINAS KESEHATAN
 dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
 NIP. 19710105 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

BIDANG YANKES



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maulida Fathia, SKM, M.PH**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kesehatan


dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan


Maulida Fathia, SKM, MPH
NIP.19711126 199703 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan sesuai standart	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	60	0	20	20	20
	Persentase desa dengan kategori sehat	10	0	0	5	5
Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	Persentase peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar	30	0	0	0	30

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Upaya Kesehatan Masyarakat	22.054.079.179,-	DAU, DAK NON FISIK dan CHT
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	183.847.900,-	DAU, DAK NON FISIK dan CHT
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.259.418.250,-	DAU, DAK Non FISIK

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004


Maulida Fathia, SKM, M.PH
NIP.19711126 199703 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Roni, S. Kep**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Maulida Fathia, SKM, M.PH**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan


Maulida Fathia, SKM, MPH
NIP. 19711126 199703 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Yankes Primer dan
Tradisional


Roni, S. Kep
NIP. 19780807 200501 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pembinaan dan penyehat tradisional dan kelompok asmantoga	5	0	2	2	1
		Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program pengembangan	19	4	5	5	5
		Jumlah Desa yang melaksanakan program PIS-PK	201	50	50	50	51
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pembinaan puskesmas yang berstatus PPK BLUD	2	0	1	0	1
		Jumlah pembinaan puskesmas yang ter Akreditasi	19	4	5	5	5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	191.232.708,-	DAU, DAK NON FISIK
2	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.259.418.250,-	DAU, CHT, DAK NON FISIK

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


Maulida Fathia, SKM, M.PH
NIP. 19711126 199703 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Yankes Primer dan Kesehatan Tradisional


Roni, S.Kep
NIP. 19780807 200501 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasanuddin, SKM, M.PH**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Jaminan Kesehatan Nasional
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Maulida Fathia, SKM, M.PH**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan


Maulida Fathia, SKM, MPH
NIP. 19711126 199703 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Yankes Rujukan
dan JKN


Hasanuddin, SKM, M.PH
NIP. 19690226 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan pelayanan kesehatan	1.511	377	378	377	379
		Jumlah Masyarakat yang terintegrasi ke JKN	125.915	31.479	31.479	31.479	31.479
		Jumlah program kesehatan essensial dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan	10	3	2	2	3
		Jumlah penanganan dan penyelesaian kasus-kasus emergency yang dilayani oleh tenaga PSC	100	25	25	25	25

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	21.862.846.471,-	DAU, CHT, DAK NON FISIK
2	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	183.847.900,-	DAU

Marabahan, 1 Februari 2019

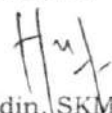
Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


Maulida Fathia, SKM, M.PH
NIP. 19711126 199703 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Yankes Rujukan
dan JKN


Hasanuddin, SKM, M.PH
NIP. 19690226 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019

BIDANG KESMAS



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Candra Wijaya, S.Si,M.Sc.,Apt**
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan


dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105/200212 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat


Candra Wijaya, S.Si,M.Sc.,Apt
NIP. 19800128 200501 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga sesuai standar	95.2%	23.8%	23.8%	23.8%	23.8%
2.	Meningkatkan kualitas kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	30%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
3.	Meningkatkan pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	Persentase pemenuhan peningkatan gizi keluarga sesuai standar	74.6%	18.65 %	18.65 %	18.65 %	18.65 %
		Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100%	25	25	25	25
		Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah	40%	10	10	10	10
		Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	60	15	15	15	15

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	279.850.700,-	DAU
2	Pengawasan Obat dan Makanan	66.289.900,-	DAU
3	Pengembangan Lingkungan Sehat	166.553.500,-	CHT
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	797.042.714,-	DAU dan CHT
5	Pelayanan Kesehatan Lansia	115.045.500,-	DAU
6	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	184.934.900,-	DAU
7	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	94.095.500,-	DAU
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	252.074.500,-	DAU
9	Perbaikan Gizi Masyarakat	295.495.700,-	DAU dan CHT

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan


dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat


Candra Wijaya, S.Si, M.Sc., Apt
NIP. 19800128 200501 1 009



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sari Dewi, SP, M.Kes
Jabatan : Kepala Seksi Kesga dan Gizi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chandra Wijaya, S.SI., MSi.Apt
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat

Candra Wijaya, S.Si., M.Sc.Apt
NIP. 198001282005011009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kesga dan Gizi

Ratna Sari Dewi, SP, M.Kes
NIP. 19740712 199603 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut sesuai standart	Jumlah pengelola program kesga yang meningkat kompetensinya tentang kesehatan keluarga	250	62	62	62	64
		Jumlah Kader yang meningkat kompetensinya tentang pelayanan kesehatan keluarga	130	30	30	30	40
		Jumlah pengkajian kasus kematian ibu dan bayi	4 (ibu) 52 (bayi)	1 13	1 13	1 13	1 13
		Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting	386	96	96	96	98
		Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan pada anak sekolah dasar untuk mendapatkan skrining kesehatan oleh petugas kesehatan (Wajar 12 Tahun, Kelas 1 dan 7)	19	4	5	5	5
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKPR	19	4	5	5	5
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan santun lansia	19	4	5	5	5
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan	19	4	5	5	5

	Jumlah petugas serta Kader yang meningkat kompetensinya tentang perbaikan gizi masyarakat	100	50			50
	Jumlah kasus masalah gizi (KEP, AGB, KVA dan GAKY) yang ditangani	0	0	0	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Kesehatan Lansia	115.045.500	DAU
2	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	190.212.900	DAU
3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	98.148.500	DAU
4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	255.508.500	DAU
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	295.495.700	DAU dan CHT
6	Program Kesehatan Reproduksi	96.010.100	DAU
7	Program Keluarga Berencana	100.359.800	DAU

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Candra Wijaya, S.Si., M.Sc.Apt
NIP. 198001282005011009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kesga dan Gizi



Ratna Sari Dewi, SP, M.Kes
NIP. 19740712 199603 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Susilawaty, S. AP, MM
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Candra Wijaya, S.Si, M. Sc, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

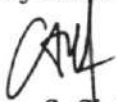
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

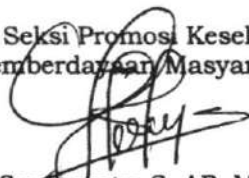
Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat


Candra Wijaya, S. Si, M. Sc, Apt
NIP. 19800128 200501 1 009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat


Hj. Susilawaty, S. AP, MM
NIP. 19640909 198501 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Terlaksananya Promosi Kesehatan	Jumlah macam media promosidan informasi yang disediakan	8 macam	2	2	2	2
		Jumlah kegiatan advokasi. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gernas Hidup Sehat melalui media Audio visual (radio, TV), kelompok masyarakat	30 kegiatan	7	8	8	7
2	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Jumlah Pembinaan Gernas Hidup Sehat kepada UKBM (kemitraan, Posyandu, Poskestren, SBH, Polindes, dll)	30 pembinaan	7	8	10	5
		Jumlah Peningkatan Kapasitas petugas promkes, nakes, kader kesehatan tentang Gernas Hidup Sehat)	150 orang	25	50	50	25

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan media promosi dan KIE Perilaku Hidup Bersih & sehat	432.672.172	DAU,CHT
2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	102.669.928	DAU
3	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	41.689.314	DAU
4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	220.011.300	DAU,CHT

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

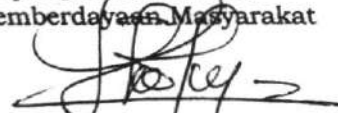
Kepala Bidang Kesmas



Candra Wijaya, S. Si, M. Sc, Apt
NIP. 19800128 200501 1 009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Promkes
dan Pemberdayaan Masyarakat



Hj. Susilawaty, S. AP, MM
NIP. 19640909 198501 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Halimuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi Kesling Kesjaor
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Candra Wijaya, S.Si, M.Sc.Apt
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat.

Candra Wijaya, S.Si, M.Sc.Apt
NIP. 19800128 200501 1 009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kesling Kesjaor

H. M. Halimuddin, SKM, MPH
NIP.19740529 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100	25	25	25	25
2	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah	40	10	10	10	10
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	60	15	15	15	15

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	279.850.700	APBD Kabupaten
2	Pengawasan Obat dan Makanan	66.289.900	APBD Kabupaten
3	Pengembangan Lingkungan Sehat	166.553.500	CHT

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat.



Candra Wijaya, S.Si, M.Sc.Apt
NIP. 19800128 200501 1 009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kesling Kesjaor



H. M. Halimudin, SKM, MPH
NIP.19740529 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

BIDANG P2



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Korawati, S.ST, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang P2P
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

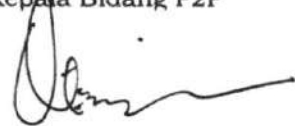
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan


dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105200212 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang P2P


Dwi Korawati, S.ST, M.Kes
NIP 19660301 198503 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar	Persentase Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare/Hepatitis, ISPA, Rabies)	100	25	25	25	25
		Persentase Penanganan kasus penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare/Hepatitis, ISPA, Rabies)	100	25	25	25	25
2	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai standar	Persentase desa / kelurahan yang terbentuk dan melaksanakan posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)	40	10	10	10	10
		Persentase WUS yang melakukan deteksi dini kanker serviks dan Payudara	100	25	25	25	25
		Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular	40	10	10	10	10
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang dilakukan pelayanan sesuai standar	100	25	25	25	25
		Persentase tempat yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 5 Tahun 2015)	20	5	5	5	5

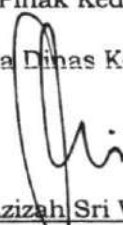
3	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Imunisasi sesuai standar	Persentase desa yang mencapai Universal <i>Children Immunization</i> (UCI)	93	23	23	23	24
		Persentase penanganan kasus yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	25	25	25	25

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Menular	Rp. 605,413,221,-	DAU dan CHT
2	Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Tidak Menular	Rp. 421,955,900,-	DAU dan CHT
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RP. 29,385,450,-	DAU dan CHT

Marabahan, 1 Februari 2019

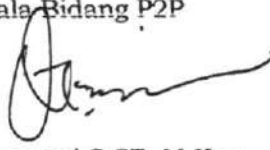
Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kesehatan


dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Pihak Pertama,

Kepala Bidang P2P


Dwi Korawati, S.ST, M.Kes
NIP 19660301 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Aida Hairiah, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular .
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dwi Korawati, S.ST. M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit.
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Dwi Korawati, S. ST. M. Kes
NIP. 19660301 198503 2 002

Pihak Pertama,

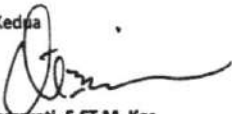
Kepala Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular

Hj. Aida Hairiah, SKM
NIP. 19621130 1983032013

		Jumlah kasus ibu hamil yang positif hepatitis ditangani sesuai standar	60/org	15	15	15	15
		Jumlah pneumonia pada balita yang ditangani sesuai standar	orang	50	75	75	50
		Jumlah ibu hamil yang diperiksa hepatitis dan HIV/Aids	2474/org	619	619	619	619

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGRAN	SUMBER DANA
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 141.925.400,-	APBD Kabupaten
	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk	Rp. 109.124.900,-	CHT
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 68.895.300,-	CHT
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 100.000.000,-	BOK

Pihak Kedua


Dwi Korawati, S.ST M. Kes
Nip. 19660301 198503 2 002

Pihak Pertama


Hj. Alisa Haliriah, SKM
Nip. 19621130 1983032013



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif ,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Tarmaji,SKM
Jabatan : Kasi Surveilans dan Imunisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selaku atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut Pihak kedua

Nama : Dwi Korawati,SST.SKM.M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang P2P.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan ,1Pebruari 2019

Pihak Kedua

Kepala Bidang P2P

Dwi Korawati,SST,SKM.M.Kes
NIP.196603011985032002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

H.Tarmaji,SKM
NIP.196505121987031024.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif ,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Tarmaji,SKM
Jabatan : Kasi Surveilans dan Imunisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selaku atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut Pihak kedua

Nama : dr.Hj.zizah Sri Widari,MPH
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan ,1Pebruari 2019

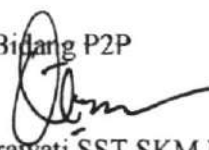
Pihak Kedua

Kepala Dinas Kesehatan

Dr.Hj.Azizah Sri Widari,MPH
NIP.197101052002121004

Pihak Pertama

Kepala Bidang P2P


Dwi Korawati,SST,SKM.M.Kes
NIP.196603011985032002

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KAB.BARITO KUALA
PEMERINTAH KAB.BARITO KUALA
TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya perjalanan dinas tim pelayanan kesehatan dalam rangka monitoring dan evaluasi SDM, Faskes dan Logistik untuk pelayanan korban bencana	6 kali	v			v
	Terlaksananya Konsultasi program penanggulangan bencana ke UK PKK Banjarbaru.	6 kd		v	v	
	Pelaksanaan pembelian peralatan lapangan dalam penanggulangan bencana	12 psg		v		
	Pelaksanaan peningkatan pengetahuan petugas pengelola program bencana Pkm	19 pkm		v		
	- Terlaksananya pengadaan Spart (Heater RCW 50 EK)	5 bh			v	
	- Terlaksananya pengadaan Spart (Thermostat RCW 50 EK)	5bh			v	
	Terlaksananya pengadaan KPI Kit	95 bh	v			
	- Terlaksananya pengadaan buku stoc Vaksin dan pencatatan suhu	190 bh	v			
	- Terlaksananya pengadaan Leaflet	5.700	v	v		
	- Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi BIAS ke Provinsi	3 oh		v		
	Terlaksananya pertemuan koordinasi penanganan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji secara Istithoah	76 oh		v		
	Terlaksananya pertemuan pengelola program kesehatan haji puskesmas tk. Kabupaten	19 org	v			
	Terlaksananya pengadaan fotocopy kegiatan pemeriksaan haji	4.591		v		
	Terlaksananya bahan Alat Kesehatan Habis Pakai pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji CJH	56 bok		v		
	Terlaksananya perjalanan dinas dim rangka pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji tahap II Tk.	20 Oh		v		
	Terlaksananya pertemuan tim kas haji dim rangka persiapan dan pemantapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap II	10 oh		v		
	Terlaksananya pembinaan program kesehatan haji ke puskesmas	19 oh	v			
	Terlaksananya pelacakan K3JH ke Puskesmas	38 oh				v
	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji pada saat berangkat menuju asrama haji	18 oh			v	
	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan jemaah haji ke asrama haji setelah jemaah tiba dari tanah suci	18 oh				v
	Terlaksananya konsultasi program kesehatan haji ke provinsi	ok	v	v	v	
	Terlaksananya pengadaan bahan/materi copyan	6.333	v	v		
	Terlaksananya Inventory coldchain & EVM	29 oh		v		
	Terlaksananya pembinaan Posyandu sebagai anggota pokjanal posyandu	3 Oh			v	
	Terlaksananya pemantauan capaian Imunisasi	19 oh	v			
	Terlaksananya Evaluasi program Imunisasi Tk. Kab	38 oh	v			v
	Terlaksananya Pembinaan program Imunisasi ke Puskesmas	38 oh	v			
	Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas SDM petugas Imunisasi Pusk dan RS	20 ok		v		
	Terlaksananya perjalanan dinas dim rangka pengambilan vaksin Rutin ke Banjarbaru	24 ok	v			v
	Terlaksananya konsultasi program Imunisasi ke provinsi	10 ok	v			v
	Terlaksananya perjalanan dinas dim rangka pengambilan vaksin BIAS MR ke Banjarbaru	2 ok		v		
	Terlaksananya perjalanan dinas dim rangka pengambilan vaksin BIAS DT/Td ke Banjarbaru	2 ok		v		
	Terlaksananya pengadaan Logtag Imunisasi	19 bh				v
	Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran bagi calon jemaah haji	250 org		v		
	Terlaksananya belanja penggandaan (foto copy)	4.592 lbr		v	v	
	Terlaksananya pengiriman laporan mingguan wabah dari RS dan klinik HB ke Kabupaten	52 mg	v			v
	Terlaksananya pengamatan dan pelacakan kasus potensial KLB/terjadinya kasus KLB penyakit atau keracuna	20 kas	v			v
	Terlaksananya pengambilan spicemen kasus AFP oleh petugas kabupaten	4 ok	v			v
	Terlaksananya follow up 60 hr kasus AFP oleh petugas kabupaten	4 oh	v			v
	Terlaksananya Pelacakan dan pengambilan spicemen kas campak oleh ptgs kabupaten ke lokasi/ desa	30 oh	v			v
	Terlaksananya pertemuan petugas surveilan PKM dan RS tk. Kabupaten	21 oh	v			
	Terlaksananya pertemuan pemegang program surveilans puskesmas tk. Kabupaten	19 oh	v			
	Terlaksananya penilaian petugas surveilan puskesmas	57oh			v	
	Terlaksananya pengiriman laporan mingguan wabah ke provinsi	12 oh	v			v
	Terlaksananya pengiriman spicemen kasus campak ke provinsi	10 oh	v			v
	Terlaksananya pengiriman spicemen kasus AFP ke provinsi	3 oh	v			v
	Terlaksananya pembelian trophy & hadiah untuk petugas surveilans berprestasi	1 set				v

Pihak Kedua

Kepala Bidang P2P

Dwi Kuswati, SST, SKM, M. Kes
NIP. 196603011985032002

Pihak Pertama

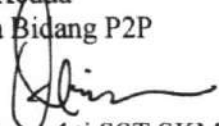
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

H. Tarmaji, SKM
NIP. 196505121987031024

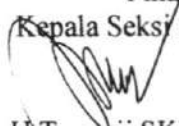
	POGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
01.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.29.385.450,-	APBD
02.	PENINGKATAN IMUNISASI	Rp.94.925.000,-	APBD
03.	PENINGKATAN SURVEILANS DAN PENANGGULANGAN WABAH.	RP.53.365.000,-	APBD
04.	PENCEGAHA DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Rp.49.716.421,-	APBD
05.	PENINGKATAN SURVEILANS DAN PENANGGULANGAN WABAH.	Rp.87.640.200,-	CHT
		Rp.315.032161,-	

Marabahan ,1 Pebruari 2019

Pihak Kedua
Kepala Bidang P2P


Dwi Korawati, SST, SKM, M. Kes
NIP.196603011985032002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi


H. Tarmaji, SKM
NIP.196505121987031024.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Supriadi, S.Kep, M. Epid
Jabatan : Kepala Seksi P2PTM dan Keswa
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

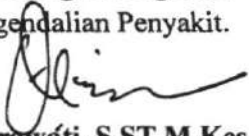
Nama : Dwi Korawati, S.ST M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

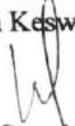
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit.


Dwi Korawati, S.ST M.Kes
NIP. 19660301 198503 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi P2PTM
dan Keswa


H. Supriadi, S.Kep, M.Epid
NIP. 19770201200012 1 003

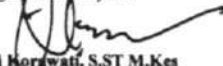
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET			
				I	II	III	IV
1	Tercapainya Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah WUS yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara melalui pemeriksaan IVA dan SADANIS	1500 orang			1500	
		Jumlah kader posbindu yg paham ttg Faktor risiko PTM berbasis WEB	40 orang		40		
		Jumlah petugas kesehatan yg paham ttg PANDU PTM	19 orang		19		
		Jumlah Dokter / Bidan yg paham ttg Deteksi dini Kanker leher rahim dan Payudara ttg IVA dan SADANIS	40 orang		40		
		Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program	1 kali				1
		Jumlah Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas	19 kali			10	9
		Jumlah pembinaan dan penilaian PKM yang melaksanakan PANDU PTM	12 kali		12		
		Jumlah Masyarakat tersosialisasi penyakit Tidak Menular sesuai standar (Hipertensi)	30 orang			30	
		Jumlah Masyarakat tersosialisasi penyakit Tidak Menular sesuai standar (DM)	30 orang			30	
2	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PTM Kesehatan Jiwa	Jumlah petugas kesehatan yg paham ttg Deteksi Dini gangguan kesehatan jiwa	19 orang			19	
		Jumlah Masyarakat tersosialisasi KIE KESWA dan Dukungan Psikososial (bebas pasung) Terhadap ODGJ berat.	570 orang			300	270
		Jumlah Kecamatan implementasi KTR 2 tempat (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan)	15 Kec			8	7
		Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program	2 kali			1	1
		Jumlah Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas	38 Kali			19	19
3	Tercapainya Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (CHT)	Jumlah kader yg paham ttg Kegiatan Posbindu dan Faktor risiko PTM.	201 orang	201			
		Jumlah Monitor dan evaluasi Tingkat Nasional	2 kali			1	1

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	Pelayanan dan Pencegahan dan Pengendalian PTM	Rp198,538,000	APBD KAB
		Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pengendalian PTM	Rp108,932,100	APBD KAB
		Pelayanan dan Pencegahan dan Pengendalian PTM (CHT)	Rp114,485,800	CHT

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit


Dwi Mordawati, S.ST M.Kes
NIP. 19660301 198503 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Keswa


H. Supriadi, S.Kep, M.Epid
NIP. 19770201 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019

BIDANG SDK



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfitri, SP., MPH.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan

Alfitri, SP., MPH.
NIP. 19711019 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart	75	0	20	25	30
		Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	30	0	10	10	10
		Persentase ketersediaan obat dan BMHP di fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	75	0	25	50	0
		Persentase Peralatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dan jaringannya sesuai standart	75	0	25	50	0
		Persentase Toko obat dan apotek berijin di periksa	20	0	0	20	0
		Persentase pengolahan jamu tradisional mendapat pembinaan	100	0	0	100	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2.988.455.057,-	APBD Kab
		Rp 104.586.249,-	APBD Kab
		Rp 3.029.956.634,-	DAK
		Rp 858.925.000,-	CHT
		Rp 427.544.000,-	DAK
			Penugasan
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 2.500.446.522,-	APBD Kab
		Rp 6.450.202.366,-	DAK
		Rp 685.633.950,-	CHT
		Rp 70.200.00,-	DAK

4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp 30.882.334,-	APBD Kab
5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 1.093.247.713,-	APBD Kab
6	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 160.087.500,- Rp 156.165.786,- Rp 108.710.400,-	APBD Kab APBD Kab CHT

Marabahan, 1 Februari
2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 19710105 200212 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber
Daya Kesehatan

Alfitri, SP., MPH
NIP. 19711019 199203 1
004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwati, M.Farm., Apt
Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Alfitri, SP, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

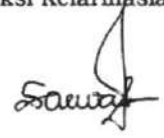
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan


Alfitri, SP, MPH
NIP. 19711019 199203 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes


Salwati, M.Farm., Apt
NIP. 19761015 200701 2 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatkan Pemenuhan Obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar	- Persentase ketersediaan obat dan BMHP di fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	75	0	25	50	0
		- Persentase Peralatan Kesehatan Sesuai Standar	75	0	25	50	0
2	Meningkatnya Pengawasan dan pembinaan toko obat dan apotek	- Persentase Toko obat dan apotek berijin di periksa	20	0	0	20	0
3	Meningkatnya penggunaan jamu atau obat tradisional	- Persentase pengolahan jamu tradisional mendapat pembinaan	100	0	0	100	0

NO

PROGRAM

ANGGARAN

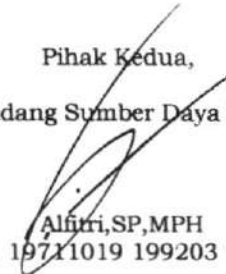
KETERANGAN

1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2,988,455,057.00	APBD KABUPATEN
		RP 104,586,249.00	APBD KABUPATEN
		Rp 3,029,956,634.00	DAK REGULER FARMASI
		Rp 858,925,000.00	CHT
		Rp 427,544,000.00	DAK STUNTING PENUGASAN

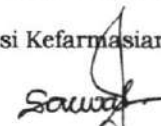
2	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	31,072,334.00	APBD KABUPATEN
3	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp	30,882,334.00	APBD KABUPATEN

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Alfiri, SP, MPH
NIP. 19711019 199203 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes


Salwati, M. Farm., Apt
NIP. 19761015 200701 2 013



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Elvera Ayu Pratiwi
Jabatan : Kepala Seksi SDM dan Sarkes
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Alfitri, SP, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

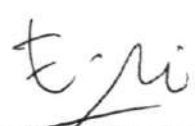
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan


Alfitri, SP, MPH
NIP. 19711019 199203 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi SDM dan Sarkes


drg. Elvera Ayu Pratiwi
NIP. 19860903 201704 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	30	0	10	10	10
2.	Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart	75	0	20	25	30

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.500.446.522,00 Rp. 6.450.202.366,00 Rp. 685.633.950,00 Rp. 70.200.000,00	DAU DAK Reguler CHT DAK Penugasan
2	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp. 1.093.247.713,00	DAU
3	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 160.0087.500,00 Rp. 156.165.786,00 Rp. 108.710.400,00	DAU DAU CHT

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Alitri, SP, MPH
NIP. 19711019 199203 1 004

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Pertama,
Kepala Seksi SDM dan Sarkes


drg. Elvera Ayu Pratiwi
NIP. 19860903 201704 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	TARGET			
				I	II	III	IV
	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah Monev ke pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (9 program)	171/org	57	38	38	38
		Jumlah bintek validasi kasus kusta,TB ,dan malaria	38/org	0	19	19	0
		Pemeriksaan sero survey HIV/Aids	100/org	0	100	0	0
		Jumlah Kasus TBC yang dilayani sesuai Standar	500/org	125	125	125	125
		Jumlah Kasus Malaria yang dilayani sesuai Standar	15/org	5	4	4	3
		Jumlah Kasus Kusta yang dilayani sesuai Standar	25/org	6	6	7	6
		Jumlah Kasus Gigitan yang dilayani sesuai Standar	5/org	2	1	1	1
		Pembagian obat cacing anak balita di posyandu dan anak SD/MI	1/kali	0	0	1	0
		Melaksanakan Fogging fokus	75/kali	25	25	10	15
		Jumlah Kasus DBD yang dilayani sesuai Standar	125/org	50	10	35	30
		Pertemuan peningkatan kapasitas pengelola Program DBD	19/0rg	19	0	0	0
		Pertemuan peningkatan kapasitas Deteksi Dini hepatitis pada ibu hamil bagi bidan desa	19/org	0	19	0	0
		Pertemuan peningkatan kapasitas bagi petugas laboratorium dalam pemeriksaan TBC	19/org	0	0	19	0
		Sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya Penyakit TBC	250/org	0	250	0	0
		Sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya Penyakit HIV/Aids	250/org	0	0	250	0
		Pencanangan Gerakan PSN 3 M Plus Tk Kab dan Kec	20/kali	10	10	0	0
		Jumlah kasus HIV / Aids yang ditangani sesuai standar	7 /org	2	2	2	1
		Jumlah kasus diare yang ditangani sesuai standar	25.500/kss	6375	6375	6375	6375



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Husin, SE, MPH
Jabatan : Analis Bimbingan dan Pelayanan Konsultasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hasanuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi JKN dan Rujukan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi JKN dan Rujukan

Hasanuddin, SKM, MPH
NIP. 19690226 198903 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Amir Husin, SE, MPH
NIP. 19660117 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imirda Widiyasari, SST
Jabatan : Analis Bimbingan dan Pelayanan Konsultasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hasanuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi JKN dan Rujukan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi JKN dan Rujukan

Hasanuddin, SKM, MPH
NIP. 19690226 198903 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Imirda Widiyasari, SST
NIP. 19820117 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidah, SST
Jabatan : Analis Bimbingan dan Pelayanan Konsultasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hasanuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi JKN dan Rujukan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi JKN dan Rujukan

Hasanuddin, SKM, MPH
NIP. 19690226 198903 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Wahidah, SST
NIP. 19780906 200604 2 013



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairuddin, S.ST, M.Kes
Jabatan : Analis Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Roni, S.Kep
Jabatan : Kepala Yankesdas dan Obat Tradisional
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Yankesdas dan Obat
Tradisional

Roni, S.Kep
NIP. 19780807 200501 1 010

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Khairuddin, S.ST, M.Kes
NIP. 19821115 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nur Fatimah, SKM, MPH
Jabatan : Penyusun Rencana Monitoring, Evaluasi dan Akreditasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Roni, S.Kep
Jabatan : Kepala Yankesdas dan Obat Tradisional
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Yankesdas dan Obat
Tradisional

Roni, S.Kep
NIP. 19780807 200501 1 010

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Dewi Nur Fatimah, SKM, MPH
NIP. 19860526 200904 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Saputra, SST
Jabatan : Analis Penyakit Menular
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Aida Hairiah, SKM
Jabatan : Kepala Seksi P2
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi P2

Hj. Aida Hairiah
NIP. 19621130 198303 2 013

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Rahmat Saputra, SST
NIP. 19801130 200604 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulindaika Yudhi Padenta, S.Kep.Ns
Jabatan : Analis Penyakit Menular
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Aida Hairiah, SKM
Jabatan : Kepala Seksi P2
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi P2

Hj. Aida Hairiah
NIP. 19621130 198303 2 013

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Ulindaika Yudhi Padenta, S.Kep, NS
NIP. 19760820 199602 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaini, SKM, MPH
Jabatan : Analis Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Aida Hairiah, SKM
Jabatan : Kepala Seksi P2
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi P2

Hj. Aida Hairiah
NIP. 19621130 198303 2 013

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Humaini, SKM, MPH
NIP. 19810531 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasni, Muflihah, SKM
Jabatan : Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penuakit
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Tarmaji, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Surveilans dan
Imunisasi

H. Tarmaji, SKM
NIP. 19650512 198703 1 024

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Hasni Muflihah, SKM
NIP. 19870108 200803 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana m, SKM, MM
Jabatan : Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi
Puskesmas
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Tarmaji, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Surveilans dan
Imunisasi

H. Tarmaji, SKM
NIP. 19650512 198703 1 024

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Fitriana M, SKM, MM
NIP. 19780903 200604 2 033



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiatus Nazifah, SKM
Jabatan : Analis
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Susilawaty, SAP, MM
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Susilawaty, SAP, MM
NIP. 19640909 198501 2 001

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Rabiatus Nazifah, SKM
NIP. 19730327 199403 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Novi Rahmika, SKM
Jabatan : Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Susilawaty, SAP, MM
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Susilawaty, SAP, MM
NIP. 19640909 198501 2 001

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Indah Novi Rahmika, SKM
NIP. 19851124 201001 2 019



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rinody Putera, SKM
Jabatan : Pemeriksa Sanitasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. Halimuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga

M. Halimuddin, SKM, MPH
NIP. 19740529 199703 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

M. Rinody Putera, SKM
NIP. 19850715 200904 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Waliansyah, SKM
Jabatan : Analis Kesehatan Kerja
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. Halimuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga


M. Halimuddin, SKM, MPH
NIP. 19740529 199703 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,


M. Waliansyah, SKM
NIP. 19731220 199803 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasidah, SKM
Jabatan : Analis
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. Halimuddin, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga

M. Halimuddin, SKM, MPH
NIP. 19740529 199703 1 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Rasidah, SKM
NIP. 19760201 199803 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Helda Erlena, SST, MM
Jabatan : Analis Kesehatan Ibu dan Anak
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ratna Sari Dewi, SP
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi

Ratna Sari Dewi, SP
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Helda Erlena, SST, MM
NIP. 19770304 200701 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahriah, SST
Jabatan : Analis Kesehatan Ibu dan Anak
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ratna Sari Dewi, SP
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi

Ratna Sari Dewi, SP
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Bahriah, SST
NIP. 19750207 200501 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samsiah, SKM
Jabatan : Analis Gizi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ratna Sari Dewi, SP
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi

Ratna Sari Dewi, SP
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Samsiah, SKM
NIP. 19810320 200604 2 012



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hukari, SKM
Jabatan : Analis Kesehatan Ibu dan Anak
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ratna Sari Dewi, SP
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi


Ratna Sari Dewi, SP
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

Pelaksana,


Siti Hukari, SKM
NIP. 19700817 199703 2 012



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko Maraharsono, AMG
Jabatan : Bendahara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Laila Wardani, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset

Laila Wardani, SKM
NIP. 19740720 199703 2 003

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Eko Maraharsono, AMG
NIP. 19830323 201001 1 028



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Patimah, AMd.Kg
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Laila Wardani, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset

Laila Wardani, SKM
NIP. 19740720 199703 2 003

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Siti Patimah, AMd.Kg
NIP. 19840306 200604 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Rosyad, SKM
Jabatan : Penata Laporan Keuangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Laila Wardani, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset

Laila Wardani, SKM
NIP. 19740720 199703 2 003

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Khairul Rosyad, SKM
NIP. 19740607 200604 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahruddin, SE, ME
Jabatan : Penata Laporan Keuangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Laila Wardani, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset

Laila Wardani, SKM
NIP. 19740720 199703 2 003

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Bahrudin, SE, ME
NIP. 19780914 200803 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Ramadhani
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Asranuddin, SIP

NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Dedi Ramadhani

NIP. 19750911 199703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabaruddin
Jabatan : Pengadministrasi Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepogawaian

Asranuddin, SIP
NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Sabaruddin
NIP. 19651110 199103 1 017



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Syarwani
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Asranuddin, SIP
NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

A. Syarwani
NIP. 19721205 200701 1 017



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fitriadi
Jabatan : Pengadministrasi Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Asranuddin, SIP
NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Akhmad Fitriadi
NIP. 19660125 198603 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Agustina, MPH
Jabatan : Analis
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Asranuddin, SIP
NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Fitria Agustina, MPH
NIP. 19790816 200604 2 016



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Zainorrahmi, SKM

Jabatan : Analis

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asranuddin, SIP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Asranuddin, SIP

NIP. 19610102 198301 1 004

Pihak Pertama,

Pelaksana,

M. Zainorrahmi, SKM

NIP. 19790729 200604 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mutalib
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nana Farlina, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Nana Farlina, SKM
NIP. 19760201 200604 2 008

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Abdul Mutalib
NIP. 19840202 201212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Akhmadi
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nana Farlina, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Nana Farlina, SKM
NIP. 19760201 200604 2 008

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Herman Akhmadi
NIP. 19811109 200701 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosnita Dachniar, SKM
Jabatan : Analis Obat dan Makanan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salwati, S.Si Apt, M.Farm
Jabatan : Kepala Seksi Farmasi dan Perbekkes
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Farmasi dan
Perbekkes

Salwati, S.Si Apt, M.Farm
NIP. 19761015 200701 2 013

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Rosnita Dachniar, SKM
NIP. 19760725 200003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviani, SKM
Jabatan : Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia
Aparatur
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Maulida Fathia, SKM, MPH
Jabatan : Kepala Seksi Saprass dan SDMK
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Februari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Saprass dan SDMK

Maulida Fathia, SKM, MPH
NIP. 19711126 199703 2 001

Pihak Pertama,

Pelaksana,

Noviani, SKM
NIP. 19761121 199603 1 002